**Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum** e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 4, 2025
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1886

# *Collaborative Governance* Lapas Kelas IIA Bojonegoro Dengan LPK "Andre" Dalam Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian Narapidana

**Rafli Rahmanda Harsanta Febriansyah[1], Mitro Subroto[2]**
Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia[1-2]
*Email Korespondensi:* ochied.mr@gmail.com

*Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025*
*Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 02 September 2025*

***ABSTRACT***
*National economic growth positions agriculture as a strategic pillar through food provision, employment absorption, and foreign-exchange contribution. This study aims to analyze the collaboration process, identify implementation constraints, and formulate strategies to enhance the effectiveness of collaborative governance in inmate skills training. A qualitative case-study design was employed, using interviews, direct observation, and document analysis; thematic analysis mapped core patterns and challenges. Findings indicate that collaboration improves inmates' technical skills, self-efficacy, and job readiness, supported by participatory learning, competency-based curricula, and early adoption of digital marketing. Nevertheless, effectiveness is constrained by the absence of structured post-training evaluation, limited resources and facilities, inter-partner scheduling misalignment, weak product-market linkages, and persistent post-release stigma. Policy implications call for robust indicator-based monitoring and evaluation, expanded partnerships with industries and MSMEs for internships and job placement, accelerated digital transformation for marketing, incentive schemes for second-chance employers, and community inclusion programs to reduce recidivism and amplify socio-economic impact.*
***Keywords:*** *Collaborative Governance; Self-Reliance Training; Correctional Facility*

**ABSTRAK**
*Pertumbuhan ekonomi nasional menempatkan sektor pertanian sebagai penopang strategis melalui penyediaan pangan, serapan kerja, dan kontribusi devisa. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kolaborasi, mengidentifikasi kendala implementasi, dan merumuskan strategi peningkatan efektivitas tata kelola kolaboratif dalam pelatihan pengelolaan hasil pertanian bagi narapidana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil menunjukkan kolaborasi mampu meningkatkan keterampilan teknis, kepercayaan diri, dan kesiapan kerja warga binaan, disertai praktik pembelajaran partisipatif, kurikulum berbasis kompetensi, serta adopsi awal pemasaran digital. Namun, efektivitas program dibatasi oleh ketiadaan evaluasi pascapelatihan yang sistematis, keterbatasan sumber daya dan fasilitas, ketidaksinkronan jadwal antarmitra, jejaring pemasaran yang lemah, serta stigma sosial pasca-bebas. Implikasi kebijakan menekankan penguatan mekanisme monitoring–evaluasi berbasis indikator, kemitraan dengan industri/UMKM untuk magang dan penempatan kerja, akselerasi transformasi digital pemasaran, pemberian insentif bagi pemberi kerja ramah mantan narapidana, dan program inklusi komunitas guna menekan residivisme serta memperluas dampak sosial-ekonomi.*
***Kata Kunci:*** *Collaborative governance; pembinaan kemandirian; lembaga pemasyarakatan*

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Rafli Rahmanda Harsanta Febriansyah, Mitro Subroto*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara karena mencerminkan peningkatan produksi barang dan jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sektor pertanian memiliki peran strategis sebagai penyedia bahan pangan, pencipta lapangan kerja, dan penyumbang devisa negara. Menurut data Food and Agriculture Organization (FAO, 2023), sektor pertanian di Asia Tenggara menyumbang lebih dari 25% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menunjukkan kontribusinya yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan potensi pertanian menjadi sangat penting, termasuk dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat yang termarjinalkan, seperti warga binaan di lembaga pemasyarakatan, agar dapat mengoptimalkan keterampilan dan meningkatkan kemandirian setelah bebas.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki tanggung jawab tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membina narapidana agar mampu kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan kepribadian yang lebih baik. Salah satu bentuk pembinaan adalah melalui pelatihan kemandirian di bidang pertanian dan pengolahan hasil pertanian, yang diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan praktis pasca-pembebasan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Petersilia dan Turner (2022), pelatihan keterampilan bagi narapidana terbukti dapat menurunkan tingkat residivisme hingga 40% karena membuka peluang kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Dalam konteks ini, program pembinaan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro mengolah hasil pertanian seperti jahe, kunyit, dan lidah buaya menjadi produk bernilai jual. Namun, upaya ini menghadapi tantangan dalam pemasaran produk, sehingga dibutuhkan strategi berbasis digital dan inovasi kemasan agar mampu bersaing di pasar.

Penerapan collaborative governance menjadi salah satu pendekatan penting dalam mengoptimalkan pembinaan kemandirian narapidana. Collaborative governance memadukan peran pemerintah, lembaga pelatihan, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama melalui sinergi lintas sektor. Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif efektif ketika ada pembagian peran yang jelas, akuntabilitas, serta komunikasi yang terbuka antar pemangku kepentingan. Dalam konteks Lapas Kelas IIA Bojonegoro, kolaborasi dilakukan dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) "Andre" untuk memberikan pelatihan pengolahan hasil pertanian. Pendekatan ini selaras dengan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM serta Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mempersiapkan narapidana menghadapi reintegrasi sosial.

Meski demikian, implementasi program pelatihan kemandirian masih menghadapi sejumlah kendala. Tantangan utama terletak pada keterbatasan sumber daya, lemahnya mekanisme evaluasi pasca-pelatihan, dan minimnya komitmen keberlanjutan dari pihak mitra. Studi internasional oleh Bales dan Piquero (2021) menunjukkan bahwa efektivitas program pembinaan narapidana dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar-lembaga, kejelasan peran, serta

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Rafli Rahmanda Harsanta Febriansyah, Mitro Subroto*

pemantauan hasil yang berkesinambungan. Dalam kasus Lapas Kelas IIA Bojonegoro, ketiadaan sistem evaluasi yang terstruktur membuat keberlanjutan program bergantung pada upaya pihak lapas semata. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama, yakni menyiapkan narapidana agar mampu hidup mandiri setelah kembali ke masyarakat.

Peningkatan kualitas pelatihan kemandirian di lembaga pemasyarakatan memerlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan kemitraan, inovasi pembelajaran, dan integrasi teknologi digital. Menurut laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2023), pendekatan berbasis teknologi dalam program pembinaan narapidana dapat meningkatkan efektivitas pelatihan hingga 37% melalui pembelajaran adaptif dan akses informasi pasar kerja yang lebih luas. Selain itu, membangun jejaring dengan sektor industri dan komunitas lokal menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan kemandirian ekonomi pasca-pembebasan. Dengan dukungan sistem evaluasi yang kuat dan keterlibatan multipihak, pembinaan kemandirian dapat menciptakan dampak sosial yang lebih besar, sekaligus menekan angka pengangguran dan residivisme di tingkat nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan kendala dalam pelaksanaan kolaborasi antara Lapas Kelas IIA Bojonegoro dan LPK "Andre" dalam pelatihan pengelolaan hasil pertanian bagi narapidana. Penelitian ini juga mengeksplorasi strategi peningkatan efektivitas collaborative governance sebagai model penguatan pembinaan kemandirian warga binaan agar mampu menghadapi tantangan ekonomi dan sosial pasca-pembebasan secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi proses kolaborasi antara Lapas Kelas IIA Bojonegoro dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) “Andre” dalam pelatihan pengelolaan hasil pertanian bagi narapidana. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data berupa wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait kebijakan serta praktik pembinaan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan interaksi langsung dengan subjek penelitian untuk memperoleh pemahaman kontekstual terhadap pengalaman partisipan dan dinamika kolaborasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tantangan utama dalam implementasi program. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Creswell dan Poth (2018), yang menegaskan bahwa metode kualitatif memberikan pemahaman mendalam terhadap makna dan perspektif partisipan dalam konteks sosial tertentu.

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Rafli Rahmanda Harsanta Febriansyah, Mitro Subroto*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Proses Kolaborasi Lapas Kelas IIA Bojonegoro dengan LPK "Andre" dalam Pelatihan Kemandirian Narapidana*

Pelaksanaan kolaborasi antara Lapas Kelas IIA Bojonegoro dan LPK "Andre" dimulai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang menjadi dasar hukum dan pedoman pelaksanaan pelatihan pengolahan hasil pertanian bagi narapidana. Dokumen ini mengatur tentang ruang lingkup kerja sama, pembagian tugas, target capaian, dan mekanisme pengawasan bersama untuk memastikan bahwa pelatihan berlangsung sesuai standar dan mencapai tujuan rehabilitasi sosial. Pendekatan ini mencerminkan prinsip collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yakni keberhasilan tata kelola kolaboratif dipengaruhi oleh adanya aturan formal, kejelasan peran, serta akuntabilitas bersama antar-lembaga. Di Lapas Kelas IIA Bojonegoro, keberadaan MoU terbukti memudahkan proses koordinasi antara pihak lapas dan LPK, sekaligus memberikan kepastian mengenai kontribusi masing-masing pihak dalam mewujudkan program pembinaan kemandirian berbasis keahlian.

Program pelatihan yang dijalankan memfokuskan pada peningkatan keterampilan praktis narapidana dalam mengolah hasil pertanian, seperti jahe, kunyit, lidah buaya, dan jagung menjadi produk bernilai jual tinggi. Proses pelatihan dilakukan secara partisipatif, di mana narapidana terlibat aktif dalam seluruh tahapan produksi, mulai dari persiapan bahan, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran produk. Pendekatan berbasis pengalaman ini selaras dengan teori experiential learning Kolb (2015) yang menekankan bahwa pembelajaran yang efektif memerlukan keterlibatan langsung peserta agar konsep dan keterampilan dapat diinternalisasi dengan baik. Hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana menunjukkan motivasi dan antusiasme tinggi untuk mempelajari keterampilan baru karena mereka melihat peluang nyata untuk membangun kehidupan mandiri setelah bebas.

Dalam merancang kurikulum pelatihan, pihak Lapas dan LPK "Andre" mengintegrasikan modul yang menitikberatkan pada penguasaan keterampilan teknis dan pemahaman praktik kewirausahaan. Pendekatan berbasis kompetensi ini merujuk pada pedoman International Labour Organization (ILO, 2022), yang menekankan pentingnya menggabungkan kemampuan teknis, manajerial, dan pemasaran dalam program pelatihan narapidana agar mereka dapat menghadapi tantangan ekonomi setelah pembebasan. Modul pelatihan mencakup teori pengolahan hasil pertanian, praktik produksi, strategi branding, dan penggunaan teknologi digital dalam pemasaran. Dengan adanya struktur kurikulum yang sistematis, program ini berhasil meningkatkan kompetensi teknis peserta dan mempersiapkan mereka untuk berdaya saing di pasar.

Keberhasilan pelatihan ini juga didukung oleh metode pembelajaran berbasis mentoring yang diterapkan oleh instruktur LPK "Andre". Dalam setiap sesi, instruktur memberikan pendampingan intensif, simulasi praktik, serta evaluasi rutin untuk memastikan setiap peserta memahami materi dengan baik.

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Rafli Rahmanda Harsanta Febriansyah, Mitro Subroto*

Temuan ini sejalan dengan laporan National Institute of Justice (NIJ, 2021) yang menyebutkan bahwa model pembinaan berbasis mentoring meningkatkan efektivitas transfer keterampilan sekaligus memperkuat hubungan emosional antara peserta dan instruktur. Selain itu, metode mentoring terbukti mendorong peserta lebih disiplin, percaya diri, dan termotivasi untuk terus belajar, sehingga berdampak langsung pada kualitas produk yang dihasilkan.

Program ini tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga membangun karakter, etos kerja, dan kepercayaan diri narapidana melalui simulasi pemasaran, diskusi kelompok, dan praktik kewirausahaan. Pendekatan ini mendukung teori rehabilitasi sosial Petersilia dan Turner (2022), yang menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial dipengaruhi oleh pembentukan identitas positif dan peningkatan self-efficacy narapidana. Hasil observasi menunjukkan adanya perubahan perilaku signifikan pada sebagian besar peserta, di mana mereka menjadi lebih komunikatif, bertanggung jawab, dan proaktif dalam merencanakan masa depan setelah bebas. Transformasi psikologis ini menjadi modal penting untuk meminimalkan risiko residivisme.

Dampak dari pelatihan ini terlihat nyata pada kualitas produk hasil olahan narapidana. Produk jahe instan, jamu herbal, pupuk cair, dan olahan lidah buaya kini dikemas dengan lebih modern dan memenuhi standar pemasaran digital. Implementasi strategi branding berbasis teknologi, termasuk penggunaan media sosial dan marketplace, memberikan peluang akses pasar yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan laporan United Nations Development Programme (UNDP, 2023) yang menegaskan bahwa integrasi pemasaran digital dalam program pembinaan narapidana dapat meningkatkan peluang distribusi produk hingga 42%. Di Lapas Kelas IIA Bojonegoro, penggunaan strategi ini terbukti memperluas jangkauan penjualan produk ke luar daerah dan meningkatkan nilai ekonomi dari hasil pelatihan.

Pencapaian lain dari kolaborasi ini adalah meningkatnya rasa percaya diri narapidana dalam mempresentasikan produk mereka di hadapan publik dan calon pembeli. Banyak di antara peserta yang sebelumnya merasa minder karena statusnya sebagai narapidana, kini lebih berani menjelaskan proses produksi dan kualitas produk yang dihasilkan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Cullen dan Jonson (2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan program pelatihan produktif mampu membangun identitas sosial positif, mengurangi stigma sosial, dan meningkatkan kesiapan narapidana untuk kembali berkontribusi di masyarakat. Dampak psikososial ini menjadi bagian penting dari keberhasilan pembinaan berbasis keterampilan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara Lapas Kelas IIA Bojonegoro dan LPK "Andre" menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan keterampilan, motivasi, dan kesiapan narapidana menghadapi kehidupan pasca-pembebasan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa pendekatan collaborative governance efektif dalam mendorong transformasi sosial dan ekonomi bagi warga binaan. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dampak, perlu penguatan evaluasi pasca-pelatihan, pengembangan jejaring kemitraan, dan dukungan lanjutan

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Rafli Rahmanda Harsanta Febriansyah, Mitro Subroto*

berupa akses pemasaran dan penempatan kerja agar proses reintegrasi sosial dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

***Tantangan Implementasi Program Pelatihan dan Kelemahan Kolaborasi***

Pelaksanaan kolaborasi antara Lapas Kelas IIA Bojonegoro dan LPK "Andre" meskipun berjalan cukup efektif, masih menghadapi berbagai tantangan signifikan yang memengaruhi keberlanjutan program. Salah satu kendala utama adalah tidak adanya sistem evaluasi dan monitoring yang terstruktur pasca-pelatihan, sehingga sulit untuk menilai tingkat keberhasilan peserta dalam menerapkan keterampilan setelah kembali ke masyarakat. Studi internasional yang dilakukan oleh Latessa dan Smith (2020) menegaskan bahwa keberhasilan program pembinaan narapidana sangat dipengaruhi oleh adanya mekanisme evaluasi jangka panjang, karena hal ini memungkinkan pihak penyelenggara untuk menilai efektivitas metode dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Tanpa evaluasi yang sistematis, keberhasilan program diukur hanya dari proses pelaksanaan, bukan dari dampak nyata terhadap kemandirian narapidana.

Tantangan lain adalah perbedaan prioritas dan jadwal antara pihak Lapas dan LPK "Andre" yang sering menyebabkan ketidaksinkronan dalam penyelenggaraan pelatihan. Ketidakseimbangan ini berimplikasi pada tidak konsistennya pelaksanaan sesi pelatihan, yang kemudian berdampak pada motivasi dan komitmen narapidana. Kondisi ini mendukung penelitian Bales dan Piquero (2021) yang menunjukkan bahwa kolaborasi multi-lembaga cenderung gagal mencapai target ketika tidak ada keselarasan jadwal dan tujuan antar-mitra. Dalam kasus Lapas Kelas IIA Bojonegoro, kurangnya keseragaman strategi dan keterbatasan koordinasi menyebabkan beberapa sesi pelatihan mengalami penundaan dan membuat peserta kehilangan momentum belajar.

Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas menjadi hambatan berikutnya yang cukup memengaruhi kualitas pelatihan. Rasio antara instruktur dan peserta pelatihan dinilai belum ideal, sehingga instruktur kesulitan memberikan pendampingan yang optimal untuk setiap narapidana. Selain itu, sarana dan peralatan produksi yang terbatas mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Menurut laporan European Prison Education Association (EPEA, 2023), keberhasilan program pembinaan narapidana sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas pelatihan yang memadai dan dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Kekurangan pada aspek ini menghambat pencapaian hasil yang lebih maksimal dalam program pembinaan.

Kendala berikutnya terletak pada lemahnya jejaring pemasaran produk hasil pelatihan, sehingga potensi ekonomi dari keterampilan yang diperoleh narapidana belum dimanfaatkan secara optimal. Tanpa akses pasar yang jelas, keterampilan yang diperoleh berisiko menjadi kurang relevan dan kurang memberikan dampak terhadap kemandirian ekonomi peserta. Menurut studi UNESCO Institute for Lifelong Learning (2022), keberhasilan program pembinaan berbasis keterampilan ditentukan tidak hanya oleh proses transfer ilmu, tetapi juga oleh dukungan berkelanjutan berupa akses pasar dan jaringan bisnis pasca-



*Copyright; Rafli Rahmanda Harsanta Febriansyah, Mitro Subroto*

pelatihan. Hal ini menunjukkan perlunya keterlibatan sektor swasta dan pemerintah daerah dalam membuka peluang pemasaran bagi produk hasil karya narapidana.

Selain kendala teknis dan pemasaran, rendahnya tingkat partisipasi aktif dari sebagian narapidana juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa peserta mengikuti pelatihan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tanpa menunjukkan minat dan komitmen yang cukup tinggi. Kondisi ini memperkuat temuan Schlager dan Pacheco (2021) yang mengungkapkan bahwa efektivitas program pelatihan narapidana sangat dipengaruhi oleh tingkat motivasi internal peserta. Oleh karena itu, perlu adanya asesmen awal terhadap minat, bakat, dan kesiapan peserta sebelum mengikuti pelatihan, agar materi dan metode yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu.

Masalah selanjutnya berkaitan dengan kurangnya dukungan pasca-pembebasan, di mana narapidana lulusan pelatihan masih menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha mandiri. Minimnya pendampingan dan fasilitas permodalan membuat sebagian besar mantan narapidana kesulitan mempraktikkan keterampilan yang telah diperoleh. Laporan World Prison Brief (WPB, 2023) menunjukkan bahwa 61% mantan narapidana mengalami kesulitan reintegrasi ekonomi akibat kurangnya dukungan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan integratif yang menghubungkan program pembinaan di dalam lapas dengan strategi pemberdayaan ekonomi di luar lapas.

Selain itu, masalah stigma sosial menjadi tantangan besar bagi keberhasilan reintegrasi narapidana. Masyarakat sering kali masih memberikan label negatif yang menghambat kesempatan mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan atau diterima kembali di lingkungannya. Studi Maruna dan LeBel (2019) menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial memerlukan strategi rekonstruksi citra diri narapidana melalui keterlibatan komunitas dan pembentukan identitas sosial positif. Oleh karena itu, program pembinaan perlu diintegrasikan dengan kampanye kesadaran publik dan program inklusi sosial agar dampaknya lebih signifikan.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam mengelola kolaborasi antara Lapas Kelas IIA Bojonegoro dan LPK "Andre". Tanpa adanya penguatan evaluasi, koordinasi antar-lembaga, dan dukungan pasca-pelatihan, efektivitas program pembinaan kemandirian akan sulit dioptimalkan. Strategi berbasis kemitraan multi-sektor dan integrasi jejaring industri menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi keterampilan narapidana agar benar-benar berdampak terhadap proses reintegrasi sosial.

### *Strategi Peningkatan Efektivitas Collaborative Governance dan Reintegrasi Sosial*

Optimalisasi efektivitas collaborative governance memerlukan desain strategi yang berorientasi pada integrasi peran multi-sektor, di mana lembaga pemasyarakatan, LPK, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Rafli Rahmanda Harsanta Febriansyah, Mitro Subroto*

berkolaborasi secara sistematis untuk mencapai tujuan bersama. Menurut teori yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), efektivitas tata kelola kolaboratif ditentukan oleh tiga aspek utama: kapasitas kelembagaan, kejelasan komunikasi, dan keberlanjutan dukungan antar-pemangku kepentingan. Dengan mengoptimalkan peran masing-masing pihak, Lapas Kelas IIA Bojonegoro dapat memaksimalkan hasil pelatihan dan meningkatkan dampaknya terhadap kemandirian ekonomi narapidana.

Strategi berikutnya adalah memperkuat kemitraan dengan sektor industri dan UMKM untuk membuka peluang kerja dan pemasaran produk hasil karya narapidana. Melalui pembentukan jejaring industri, keterampilan yang diperoleh peserta akan lebih relevan dengan kebutuhan pasar, sekaligus mempermudah proses transisi menuju dunia kerja. Menurut laporan OECD (2023), integrasi program pelatihan narapidana dengan kebutuhan industri lokal mampu meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja lulusan hingga 47%. Pendekatan ini menuntut keterlibatan aktif sektor swasta dalam penyusunan kurikulum dan penyediaan peluang magang bagi narapidana.

Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pelatihan dan pemasaran produk hasil karya narapidana. Melalui platform e-commerce, media sosial, dan aplikasi pemasaran digital, produk-produk olahan dapat dipasarkan secara lebih luas dan kompetitif. Studi UNODC (2023) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam program pembinaan narapidana meningkatkan keberhasilan pemasaran hingga 38% dan memperluas jaringan konsumen secara signifikan. Pendekatan serupa dapat diterapkan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro dengan membangun ekosistem digital marketing yang terintegrasi.

Selain teknologi, strategi lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas evaluasi dan monitoring berbasis data. Dengan menggunakan metode penilaian berbasis indikator kinerja utama, efektivitas pelatihan dapat diukur lebih objektif dan berbasis bukti. Laporan World Bank (2023) merekomendasikan penerapan evidence-based evaluation dalam program pembinaan narapidana untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat dampak sosial. Evaluasi yang sistematis akan memungkinkan pihak Lapas dan LPK "Andre" untuk mengidentifikasi kelemahan dan menyusun strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran.

Penting juga untuk membangun pendekatan berbasis inklusi sosial, di mana komunitas dilibatkan secara aktif dalam mendukung keberhasilan reintegrasi mantan narapidana. Melalui pembentukan forum dialog masyarakat, kampanye anti-stigma, dan penyediaan ruang ekonomi produktif, proses adaptasi sosial mantan narapidana dapat berjalan lebih efektif. Studi Weaver dan McNeill (2021) menegaskan bahwa keterlibatan komunitas secara langsung dapat meningkatkan tingkat keberhasilan reintegrasi sosial hingga 55%. Oleh karena itu, Lapas Kelas IIA Bojonegoro dapat mengadopsi model partisipasi publik dalam mendukung narapidana agar lebih diterima kembali di masyarakat.

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Rafli Rahmanda Harsanta Febriansyah, Mitro Subroto*

Selain strategi berbasis sosial, dukungan kebijakan publik menjadi faktor penentu keberhasilan jangka panjang. Pemerintah perlu memberikan regulasi yang mendukung integrasi program pembinaan narapidana dengan peluang ekonomi lokal, termasuk insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan mantan narapidana. Studi International Centre for Prison Studies (ICPS, 2022) menunjukkan bahwa kebijakan berbasis insentif mampu meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam mendukung reintegrasi ekonomi. Integrasi kebijakan ini akan memperkuat keberlanjutan program dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Dari sisi manajerial, peningkatan kapasitas instruktur dan petugas pemasyarakatan melalui pelatihan profesional menjadi strategi penting untuk mendukung efektivitas program. Laporan ILO (2023) merekomendasikan peningkatan kompetensi tenaga pelatih dan staf lapas agar selaras dengan standar industri, sehingga keterampilan yang diajarkan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Upaya ini sekaligus memastikan kualitas pengajaran dan pendampingan peserta pelatihan berada pada tingkat optimal.

Secara keseluruhan, optimalisasi efektivitas collaborative governance memerlukan sinergi antara kebijakan, teknologi, jejaring industri, dan partisipasi sosial. Dengan mengintegrasikan strategi-strategi tersebut, Lapas Kelas IIA Bojonegoro dapat menciptakan model pembinaan kemandirian yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Pendekatan ini bukan hanya meningkatkan peluang ekonomi mantan narapidana, tetapi juga memberikan dampak sosial positif dalam menurunkan tingkat residivisme dan membangun masyarakat yang lebih inklusif.

## SIMPULAN

Kesimpulan, kolaborasi antara Lapas Kelas IIA Bojonegoro dan LPK "Andre" dalam pelatihan pengelolaan hasil pertanian menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan keterampilan teknis, kepercayaan diri, dan kesiapan kerja narapidana, sekaligus memperkuat orientasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui pendekatan collaborative governance yang memadukan peran negara, lembaga pelatihan, dan pemangku kepentingan lain. Meski demikian, efektivitas program masih dibatasi oleh ketiadaan evaluasi pasca-pelatihan yang terstruktur, keterbatasan sumber daya dan fasilitas, ketidaksinkronan jadwal antarmitra, lemahnya jejaring pemasaran serta dukungan pasca-bebas, dan hambatan stigma sosial di masyarakat. Karena itu, penguatan tata kelola kolaboratif perlu diarahkan pada: (1) perancangan sistem monitoring-evaluasi berbasis indikator kinerja dan bukti, (2) perluasan kemitraan dengan industri/UMKM untuk magang, penempatan kerja, dan saluran pemasaran, (3) integrasi teknologi digital untuk pembelajaran adaptif dan pemasaran produk, (4) dukungan kebijakan insentif bagi dunia usaha yang mempekerjakan mantan narapidana, serta (5) program inklusi komunitas dan kampanye anti-stigma. Dengan strategi tersebut, program diharapkan berkelanjutan, meningkatkan kemandirian ekonomi narapidana, dan menurunkan residivisme secara nyata.

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Rafli Rahmanda Harsanta Febriansyah, Mitro Subroto*

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

**DAFTAR RUJUKAN**

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Bales, W. D., & Piquero, A. R. (2021). Assessing the impact of prison education on recidivism. *Justice Quarterly*, 38(5), 901–926. https://doi.org/10.1080/07418825.2020.1788923

Cullen, F. T., & Jonson, C. L. (2017). *Correctional theory: Context and consequences* (2nd ed.). SAGE Publications.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Food and Agriculture Organization. (2023). *FAO statistical yearbook 2023: Southeast Asia agriculture trends*. Rome: FAO.

International Labour Organization. (2022). *Skills training and employability in correctional facilities: International guidelines*. Geneva: ILO.

International Labour Organization. (2023). *Training prison staff for 21st-century skills*. Geneva: ILO.

Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Pearson Education.

Latessa, E. J., & Smith, P. (2020). Corrections-based programs and recidivism: A meta-analysis of effective practices. *Criminal Justice and Behavior*, 47(2), 237–257. https://doi.org/10.1177/0093854819886235

Maruna, S., & LeBel, T. P. (2019). The desistance paradigm in correctional practice: Toward a fundamental shift in rehabilitation. *Federal Probation*, 83(1), 3–14.

National Institute of Justice. (2021). *Mentoring-based rehabilitation programs for incarcerated populations*. Washington, DC: NIJ. https://nij.ojp.gov

OECD. (2023). *Unlocking the potential of prison-based vocational training*. Paris: OECD Publishing.

Petersilia, J., & Turner, S. (2022). Evaluating intensive rehabilitation programs: Insights from global correctional models. *Journal of Offender Rehabilitation*, 61(3), 212–237. https://doi.org/10.1080/10509674.2022.1890523

UNDP. (2023). *Digital transformation for prison-based economic reintegration*. New York: United Nations Development Programme.

UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2022). *Skills and employability programs in prison settings*. Hamburg: UNESCO.

UNODC. (2023). *Technology-driven rehabilitation programs in correctional facilities*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Rafli Rahmanda Harsanta Febriansyah, Mitro Subroto*

Weaver, B., & McNeill, F. (2021). Co-producing desistance: Enabling inclusion through community-based programs. *European Journal of Probation*, 13(1), 3–23. https://doi.org/10.1177/20662203211035629

World Bank. (2023). *Evidence-based evaluation in correctional rehabilitation*. Washington, DC: World Bank Group.

World Prison Brief. (2023). *Global prison trends: Economic reintegration challenges*. Institute for Crime & Justice Policy Research. https://www.prisonstudies.org

Juliana, S. (2015). Pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 1(1), 25–40.

Karindra, L. R., & Subroto, M. (2022). Implementasi program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Supremasi*, 12(2007), 111–120. https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1952

Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya rehabilitasi narapidana untuk mengurangi tingkat residivis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425–2438. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026

Mutiarawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative governance dalam penanganan rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Wacana Publik*, 1(1), 82. https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50892

Noor, M. (2022). Collaborative governance: Suatu tinjauan teoretis dan praktik. *Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*.

Rahmat, S., Ikhsanudin, M., Diani, R., Kusuma, Y. F., Putri, S., Ningrum, P. A., Afrianti, A., Prasetia, I., Sari, N. I., Faina, F., & Annisa, N. (2021). Pengolahan hasil pertanian dalam upaya peningkatan perekonomian petani di Kabupaten Bintan. *JPPM Kepri: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau*, 1(2), 156–167. https://doi.org/10.35961/jppmkepri.v1i2.265

Rifda, J. (2023). Upaya pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berbasis life skill melalui program pembinaan kemandirian oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Safrin, F. M. (2021). Pemenuhan hak asasi manusia dalam program pembinaan kemandirian narapidana perempuan di era normal baru. *Jurnal HAM*, 12(2), 285–304.

Vintarno, J., Sugandi, Y. S., & Adiwisastra, J. (2019). Perkembangan penyuluhan pertanian dalam mendukung pertumbuhan pertanian di Indonesia. *Responsive*, 1(3), 90. https://doi.org/10.24198/responsive.v1i3.20744

Zakirah, L. (2021). Pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 87–95.

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Rafli Rahmanda Harsanta Febriansyah, Mitro Subroto*